
Perubahan Sosial Kehidupan Masyarakat Tahanan Politik Di Desa Savana Jaya Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru

¹Putri Ngilmy, Rina Pusparani

¹*Pendidikan Geografi, Universitas Pattimura, Indonesia*

***Correspondence Author:** rina.puspita@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kehidupan masyarakat tahanan politik di Desa Savana Jaya, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, serta mengungkap perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan mereka. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali pengalaman dan dinamika sosial para tahanan politik, yang sebagian besar mengalami penangkapan, penahanan, dan perlakuan keras setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Di bawah pengawasan tentara, para tapol bekerja memabat hutan dan mencetak sawah, menciptakan daerah pertanian produktif dari lahan yang sebelumnya berupa hutan belantara. Interaksi antara tapol dan penduduk asli memicu pertukaran budaya dan ekonomi, memperkenalkan teknik pertanian baru dan meningkatkan kesejahteraan lokal. Hasil penelitian menunjukkan perubahan signifikan dalam aspek ekonomi, bahasa, dan budaya, dengan adanya pernikahan antar kelompok yang menciptakan perpaduan budaya Jawa dan Buru. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang perubahan sosial di Pulau Buru dan kontribusi para tapol dalam mengubah kondisi sosial-ekonomi setempat.

Kata kunci: Kehidupan Masyarakat, Perubahan Sosial, Tahanan Politik

Abstrak: This study aims to delve into the lives of political detainees in Savana Jaya Village, Waeapo District, Buru Regency, and uncover the social changes that have occurred in their lives. Through a descriptive qualitative approach, this research explores the experiences and social dynamics of political prisoners, most of whom experienced arrest, detention, and harsh treatment after the September 30th Movement in 1965. Under military supervision, the prisoners worked to clear forests and create rice fields, transforming what was once wilderness into productive agricultural areas. Interaction between the prisoners and the indigenous people triggered cultural and economic exchanges, introducing new agricultural techniques and improving local welfare. The research findings indicate significant changes in economic, linguistic, and cultural aspects, with intergroup marriages creating a blend of Javanese and Buru cultures. This study provides a comprehensive understanding of social changes on Buru Island and the contributions of the prisoners in transforming the local socio-economic conditions.

Keywords: Community Life, Social Changes, Political Prisoners

PENDAHULUAN

Sejarah dunia adalah sejarah orang muda, jika angkatan muda mati rasa maka matilah sebuah bangsa, (Pramoedya Ananta Toer, 1980). Menurut Ali Syari'ati (2011) faktor penggerak perubahan masyarakat tidak terlepas dari mazhab antara lain kelompok yang tidak menganggap sejarah sebagai acuan perubahan, kedua adalah kelompok anarkisme yang berpendapat bahwa setiap peristiwa adalah kejadian yang tidak disengajai, yang ke tiga aliran materialisme yang berpendapat bahwa individu tidak memiliki pengaruh atas nasib masyarakat, yang ke empat kelompok yang menyembah tokoh, terbagi menjadi dua yakni

kelompok pemuja pahlawan dan kelompok penyembah tim elite.

Dalam kehidupan bernegara tentu politik merupakan unsur terpenting, sebab berdirinya sebuah Negara adalah hasil dari revolusi politik, dan juga manusia adalah hewan politik. Menurut (Aristoteles, 2007), politik berasal dari kata Polis yaitu kota atau perkumpulan yang bukan hanya sebatas perkumpulan semata namun politik sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan bersama, maka dari itu politik menjadi alat untuk mencapai keadilan. Begitu pula interaksi politik, ia merupakan kepentingan yang selalu ada dan beriringan dengan kekuasaan pemerintah demi mengeruk potensi ekonomi (Watimena, 2020). Perjalanan peradaban manusia adalah rangkaian peristiwa

sejarah, maka dari itu hiruk pikuk politik nasional menjadikan peristiwa bersejarah terus hidup, kejadian demi kejadian terus berlangsung, Revolusi Indonesia, gejolak Politik Nasional salah satunya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia/PKI atau disingkat G30S PKI. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa Gerakan 30 September yang bermuara pada tragedi nasional berupa pembunuhan massal (1965-1966). Pembantaian massal hingga pengasingan di beberapa pelosok Negeri, salah satu buktinya terjadi di Desa Savana Jaya Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Pada tahun 1970, 10.000 orang dikirim ke Pulau Buru dengan menggunakan kapal perang ALRI. Pengiriman tahanan politik tanpa sepengetahuan mereka, dilakukan secara rahasia (Watimena, 2020).

Peristiwa G.30.S/PKI 1965 melahirkan pemerintahan Orde Baru. Demi mempertahankan pemerintahan Orde Baru, diadakan pembersihan terhadap unsur-unsur komunis yaitu dengan menyelenggarakan Proyek Instalasi Rehabilitasi Pulau Buru (Proyek Inrehab Buru 1969-1979). Dasar hukum untuk menyelenggarakan Proyek Inrehab Buru adalah Undang-Undang; Nomor 5 Tahun 1969 tentang kewenangan melakukan penawanan dan pemberantasan kegiatan subversi. Mereka yang diikutsertakan dalam Proyek Inrehab Buru adalah beberapa tapol golongan B dari Pulau Jawa. Para tapol Pulau Buru beranggapan bahwa pemerintah Orde Baru menahan para tapol ke Pulau Buru tidak berdasarkan hukum, karena mereka belum pernah diajukan ke pengadilan, sehingga belum bisa dinyatakan bersalah secara hukum (Krisnadi, 1997).

Di bawah pengawasan tentara, para tapol dipekerjakan untuk membuat lahan pertanian hingga irigasinya dengan cara membabat hutan, padang rumput, rawa agar bisa ditanami, selain itu tapol dipekerjakan membangun sarana fasilitas pemerintah maupun masyarakat, pada intinya di Pulau Buru dimanfaatkan untuk pembangunan di sana. Para tapol bekerja tanpa mengenal libur, mereka membangun fasilitas sendiri untuk fasilitas mereka. tapol yang bekerja di bawah pengawasan tentara, mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh tentara. Apabila tidak mengikuti perintah mereka akan mendapatkan sanksi. Sekitar tahun 1973 para

tapol Pulau Buru mulai diberikan kebebasan untuk kehidupan mereka. Kebebasan tersebut berupa kelayakan hidup sebagai masyarakat pada umumnya dalam lingkungan tahanan Pulau Buru (Setiawan & Andrean Eka, 2016).

Para tapol bukan hanya diisolasi, tetapi juga diwajibkan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang sudah diatur. Diantaranya meliputi, mencetak sawah, menanam, memanen, membabat hutan, membuat jalan, rumah, bendungan hingga tempat ibadah serta berbagai pekerjaan berat lainnya. Para tapol juga dituntut hidup mandiri, membiayai lauk pauk petugas sampai keharusan membiayai pembangunan sarana prasarana. Selain itu, hasil dari proyek yang dikerjakan para tapol, seperti hasil penggergajian kayu akan digunakan sebagai pengisi kas. Singkatnya, terjadi eksploitasi terhadap tenaga tapol. Tahanan politik Pulau Buru harus dihadapkan pada suatu keadaan yang rumit dan menyiksa dimana kebebasan terbatas, dipaksa bekerja, menerima beberapa bentuk kekerasan fisik dan yang paling berat adalah jauh dari sanak keluarga. Semua hal tersebut berpengaruh terhadap kesehatan mental para tapol, akibatnya kebanyakan tapol memiliki sifat yang cenderung tertutup dan pendiam. (Tusipa, 2023).

Para tahanan politik ini hidup dalam kondisi yang sangat keras. Mereka harus membangun infrastruktur dasar seperti jalan, rumah, dan fasilitas umum dari nol. Meskipun berada di bawah pengawasan ketat militer, para tapol berusaha beradaptasi dan membangun kehidupan yang lebih layak. Interaksi antara tapol dan penduduk asli Pulau Buru mulai terjadi seiring waktu. Penduduk asli yang sebagian besar berasal dari suku-suku setempat dengan kehidupan tradisional, mulai terpengaruh oleh kehadiran para tapol. Pertukaran budaya, pernikahan antar kelompok, dan pengaruh tapol dalam berbagai aspek kehidupan mulai tampak. Para tapol yang sebagian besar memiliki keterampilan bertani dan berdagang mulai mengembangkan perekonomian lokal. Mereka memperkenalkan teknik-teknik pertanian baru, membangun pasar, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Proses ini membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Pulau

Buru. Perubahan sosial di Pulau Buru berdampak pada generasi berikutnya, dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan ekonomi lokal. Identitas budaya yang lebih beragam dan dinamis juga menjadi warisan dari proses perubahan ini (Tusipa, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kehidupan masyarakat tahanan politik pada awal kedatangan mereka di Desa Savana Jaya, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, serta perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan mereka di desa tersebut.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kehidupan masyarakat tahanan politik di Desa Savana Jaya, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, serta mengungkap perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan mereka di desa tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini fokus pada deskripsi yang mendalam mengenai pengalaman dan dinamika sosial para tahanan politik, baik dari data tertulis maupun lisan yang diperoleh dari narasumber terpercaya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Bapak Harto Wiyono, Bapak Diro Utomo, serta keluarga eks tahanan politik, sementara data sekunder diambil dari literatur terkait seperti buku karya Pramodya Ananta Toer dan jurnal ilmiah.

Penelitian dilaksanakan selama sebulan penuh dengan pengambilan data dari Februari hingga Maret 2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling untuk memilih informan yang dapat memberikan wawasan yang mendalam dan representatif terhadap fenomena yang diteliti. Proses pengumpulan data melibatkan observasi lingkungan, wawancara mendalam, dan studi pustaka, diikuti dengan analisis interaktif untuk mereduksi, menafsirkan, dan memverifikasi data. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi dari berbagai sumber, menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi penting dalam memahami

perubahan sosial yang dialami oleh komunitas tahanan politik di Desa Savana Jaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kehidupan masyarakat tahanan politik pada awal kedatangannya di Desa Savana Jaya

Pada masa orde lama ada beberapa partai politik yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, PNI, GERWANI dan masih banyak lagi, serta diantaranya yaitu PKI (Partai Komunis Indonesia). PKI sendiri diincar bahwa mereka merupakan haluan keras namun itu semua tidaklah benar. Para tapol hanya memperjuangkan rakyat mereka agar sejahtera, makmur dan adil. Tapi disebabkan permainan politik siapa yang merasa lebih kuat maka diusahakan supaya menjadi lemah.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menandai satu babak penting sejarah Indonesia yang brutal. Tragedi ini membekas. Ribuan orang diasingkan bertahun-tahun. Penangkapan mereka dimulai atas tuduhan terkait Partai Komunis Indonesia atau antek komunis. Mereka dicituk, ditawan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan, pembunuhan dan penangkapan secara paksa anggota PKI atau segala organisasi berbau komunis dilakukan ketika terbit Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966. Kepres yang diteken Mayor Jenderal Soeharto, saat itu Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, bertujuan membubarkan dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Pada 5 Juli 1966—menanggapi keinginan Soeharto—Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan TAP MPRS No. XXV/1966 (KontraS, G. T. 2012).

Sebelum diasingkan ke Pulau Buru, kehidupan para tahanan politik (tapol) yang dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September (G30S) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, dan profesional mereka. Namun, mereka umumnya mengalami penangkapan, penahanan, dan perlakuan yang keras selama periode penindasan terhadap orang-orang yang dianggap simpatisan atau anggota PKI setelah peristiwa G30S pada tahun 1965. Pengiriman Tapol ke Pulau Buru pun dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan

mereka, dan pemberangkatan dilakukan secara rahasia. Sejak dimasukkan dalam kapal, para tahanan tidak tahu akan dibawa kemana. Sebagai manusia Indonesia yang memiliki hak yang sama di mata hukum, meskipun mereka berstatus sebagai tahanan, seharusnya mereka lebih diperlakukan secara manusiawi. Perlakuan terhadap mereka seakan-akan mengisyaratkan tercabutnya hak mereka sebagai seorang manusia dan sebagai warga negara RI. Artinya, telah terjadi penghianatan atas Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila keempat, permusyawaratan dan perwakilan yang menyiratkan makna perlunya demokrasi atas dasar konsensus dalam menyikapi berbagai persoalan tidak berlaku untuk mereka. Pun demikian dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pulau inilah yang dituju oleh para tahanan politik. Perjalanan mereka ke pulau ini dimulai saat mereka mendarat di Teluk Namlea.

Buru pada masa lampau adalah hutan lebat dengan sagu sebagai tanaman yang diandalkan oleh penduduk lokal sebagai sumber makanan mereka. Penduduk Buru memiliki budaya seperti pertanian tari-tarian seperti sawat Buru dan cakalele, serta nyanyian-nyanyian Buru seperti inafuka yang lazim dilantunkan pada pelaksanaan ritual tersebut. Tradisi penduduk Waeapo dalam pembukaan lahan kebun baru. Pemerintah pada masa itu membuat upaya untuk mengasingkan para tahanan politik yang dianggap mempunyai hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), salah satunya ke pulau Buru.

Menurut D.U (20 Februari 2024), perjalanan masyarakat tahanan politik ke Pulau Buru dimulai pada tahun 1970 dari pulau Jawa dengan menggunakan kapal untuk sampai di pulau Buru. Yang 1 kapal dengannya berjumlah 500 orang tetapi jumlah keseluruhan terdapat 12.000 orang yang datang dari pulau Jawa ke pulau Buru lalu menempati 21 unit-unit barak pengasingan. Kehidupan awal tahanan politik di Pulau Buru, khususnya di Desa Savana Jaya, dimulai dengan kegiatan keras dan berat. Para tahanan politik yang dibuang ke Pulau Buru pada akhir tahun 1970, seperti yang diceritakan oleh Bapak D.U, mereka diharuskan melakukan pekerjaan keras seperti membat hutan dan alang-alang dengan tangan kosong, mencetak

sawah, membuat jalan serta bendungan dengan peralatan seadanya. Mereka juga diharuskan melakukan pekerjaan lain seperti membuka dan mengolah lahan pertanian. Kondisi ini sangat berat dan memerlukan kesabaran serta kekuatan fisik yang tinggi.

Bagi para Tahanan politik perjalanan panjang sejak dari Nusakambangan tentu sangat melelahkan. Sesampai ditempat tujuan mereka sebenarnya membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulai kehidupan di Pulau Buru. Namun demikian, pagi jam 04:00 sudah terdengar panggilan dari para aparat. Mereka diharuskan untuk segera bangun, berbaris di lapangan, dan melakukan senam pagi. Setelah itu datang perintah pertama, bahwa mereka harus membuka daerah untuk membuat jalan, tanpa dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, mereka harus melakukan semuanya dengan tangan, sehingga tangan mereka berlumuran darah akibat membat alang-alang. Sedangkan peralatan kerja baru tiba 10 hari kemudian, seperti shlieper, kapak, linggis, gergaji, dan pisau (Tati Haryati, 2018 : 687).

Setiap hari kerja rodi di Tefaaf dimulai jam 6 pagi. Diawali apel pukul 4 atau 5 subuh. Istirahat ketika waktu makan siang. Pekerjaan dihentikan pukul 17.00 WIT. Kadang terdengar suara minta tolong, di samping para tahanan yang tengah terseok beban kerja dan orang-orang berlari ke arah datangnya suara. Ditemukan badan tumbang tanpa kepala, punggung tertembus tombak. Kejahatan itu merupakan luapan kemarahan dari penduduk setempat. Sumber berang ini disebabkan pembukaan lahan di Tefaaf. Kegiatan tapol itu dianggap menggusur hutan, yang dari zaman baheula menjadi lumbung makanan penduduk. Alhasil, wilayah berburu pun kian sempit, dan menumbuhkan dendam. Kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa banyak datang dari tangan tentara (wawancara dengan D.U pada 20 Februari 2024).

Para tapol diperintahkan membuka jalan tanpa alat. Karena memang belum ada. Jalan yang harus dibuka itu menerjang padang rumput, dan rumput itu tinggi (alang-alang) rumput beruas yang lebih dua meter tinggi, rumput persegi tiga dengan sirip setajam silet sampai setinggi satu setengah meter. Semua

dicabuti dengan tangan telanjang, selama hari-hari kerja. Dan tidak setiap orang punya topi. Dalam panas yang sengangar yang lembab di tengah-tengah padang rumput, dengan hanya pohon kusu-kusu kurus di sana-sini. Rumput tak mungkin tercabut bersih, apalagi sampai ke akarnya. Yang pasti, telapak tangan dan jari-jari berdarah. Enam hari pencabutan rumput dilakukan, tangan bukan saja berdarah-darah juga pada bengkak (Pramoedya Ananta Toer. 1988 : 50).

Para tahanan politik (tapol) yang ditahan di Pulau Buru setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 mendapatkan hak atas tanah melalui inisiatif pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Program ini merupakan bagian dari kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para tapol setelah mereka dibebaskan dari tahanan. Sejak tahun 1970, para tapol mulai dikirim ke Pulau Buru untuk dipekerjakan di bidang pertanian. Setelah beberapa tahun, sekitar awal 1970-an, pemerintah mulai memberikan hak pengelolaan tanah kepada para tapol di Pulau Buru sebagai bagian dari upaya mereka untuk menciptakan masyarakat mandiri dan produktif. Pemberian hak tanah ini dimaksudkan untuk memudahkan para tapol dalam mencari nafkah dan membangun kehidupan baru setelah mereka selesai menjalani hukuman. Meskipun secara formal hak tanah ini diberikan oleh pemerintah, implementasi kebijakan ini dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah termasuk Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, dan militer yang memiliki otoritas di daerah tersebut. Program ini juga mencakup pelatihan pertanian dan bantuan teknis untuk mendukung keberhasilan para tapol dalam mengelola lahan yang diberikan kepada mereka (wawancara dengan bapak D.U).

Di Pulau Buru, tapol hampir tak memiliki kebebasan. Bogem atau lars tentara semacam jatah lain bagi tapol yang dianggap tak serius bekerja. "Pas urus sawah, mengatur pematang, itu perlu diinjak-injak gini toh, malah dikira kerja main-main", ujar H.W dengan senyum tersungging. "Lalu saat menabur bibit, mereka bilang, 'Orang Jawa bodoh! Sudah ditanam

malah dicabuti lagi". "Nah, itu disuruh koprol sama push up oleh tentara".

Mereka membuka hutan belantara dengan alat seadanya, jika menolak akan disiksa aparat keamanan. "Kami pagi-pagi bangun lalu apel, terus mencabut rumput-rumput di sekeliling barak terus juga membuka areal hutan, babat hutan pakai tangan, kemudian pakai kapak atau gergaji," ungkap D.U. "Selama ditahan dan bekerja di Pulau Buru, ya, sering juga dapat siksaan, di pelipis dan kaki," jelas D.U.

Bertahun-tahun dirundung siksa, kesulitan makanan, serta menjadi pemakan segala, mereka tetap bertahan. Dengan berbagai tekanan, mulai tekanan mental maupun fisik selama bekerja di pulau Buru. Tekanan-tekanan yang dialami oleh para tapol tersebut juga berdampak pada persepsi mereka tentang kebencian terhadap penguasa saat itu. Dalam keadaan yang serba kekurangan, para tapol terpaksa menjadi orang-orang yang harus mampu menciptakan apapun guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, mulai dari mengolah makanan, hingga melindungi tubuhnya. Selama berada di pengasingan pulau Buru para tapol benar-benar berada jauh pada kehidupan sosial pada umumnya. Dalam perkembangannya, timbul persepsi yang seragam antara sesama tapol terhadap pemerintahan pada masa itu.

Area Tefaaf adalah tanah milik Negeri Kayeli dan Negeri Leisiela. Dua kawasan di pedalaman Waeapo tersebut diserahkan ke pemerintah serta diubah menjadi area pertanian seluas 235 ribu hektare. Savana liar di kawasan Tefaaf seluas 2.350 kilometer persegi disulap 13.000 tapol sebagai lahan bercocok tanam. Sejak 1970 atau 54 tahun silam, Tefaaf adalah hutan belukar, liar, gelap, dan angker. Separuh dari kamp tahanan ini dipagar dinding bukit. Tumbuh pohon kayu putih, meranti, sagu, kelapa, serta sabana setinggi dua meter, juga Sungai Way Apo yang menelan sejumlah tapol. Enam bulan menjadi tempat pembuangan, ratusan hektare hutan di Pulau Buru dibabat. Pohon berukuran dua pelukan orang dewasa digergaji dengan peralatan seadanya. Di tangan tapol tempat yang semula angker ini disulap menjadi lumbung padi, tak hanya dinikmati di tanah Bupolo—sebutan Pulau Buru—juga di Maluku. Enam bulan pertama menjadi masa sulit bagi tapol. Mereka diminta membuka

lahan, membuat jalan, barak, rumah ibadah, saluran irigasi, sawah, ladang, serta area peternakan. Namun mereka hanya diberi makan siang 300 gram serta jatah malam 200 gram nasi campur bulgur. “Sering banget dikasih ikan asin, rasanya tidak asin lagi”, ujar H.W. Kekurangan porsi makan di tanah pengasingan memaksa mereka menjadi pemakan segala. Setiap kali protein dibutuhkan tubuh, maka, babi, anjing, tikus, ular, rusa, hingga buaya disantap. “Dulu namanya babi, Kristen maupun Islam tetap makan untuk menyambung hidup bahkan ada yang makan anjing”, ujar H.W.

Sepuluh hari setelah kedatangan baru diperoleh alat-alat cangkul Schlieper yang cukup baik dan tajam, parang besi tanpa sedikit pun baja, linggis, kapak dan gergaji. Pembabatan rumput mulai dilakukan dengan parang besi. Tetapi rumput tidak putus kena hantaman, hanya rebah dalam keadaan pingsan. Dan bila dipergunakan menebang cabang juga tidak putus, cabang itu sempal pada ketiaknya pohon. Kamp perbudakan sekilas berubah seusai pembebasan tapol. Sepanjang Savanajaya – Unit V Wanakarta sawah membentang luas di kanan-kiri jalan. Tempat ini belum dipadati rumah atau bangunan lain. Sepanjang itu dataran rendah diisi petak sawah warga yang awalnya didatangkan sebagai transmigran.

Boleh dibilang Pulau Buru ini dibangun dengan keringat dan air mata tahanan politik sehingga Buru kini telah menjadi lumbung padi di kawasan Indonesia tutur D.U yang memilih hidup di Savana Jaya. Mulai tahun 1972, banyak istri dan anak para tapol didatangkan dari Pulau Jawa sehingga setelah masa pembebasan pada tahun 1979 banyak para mantan tahanan politik lebih memilih menetap di Pulau Buru tempat

dimana mereka menghabiskan waktunya dalam bekerja paksa.



Gambar 1. Sketsa Pendaratan Tahanan Politik di Teluk Namlea

Sumber : Gregorius Soeharsojo Goenito, Tiada Jalan Bertabur Bunga, Memoar Pulau Buru dalam Sketsa (Yogyakarta: Insist Press, 2016)

Delapan belas unit Inrehab tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut:

No	Nama Inrehab	No	Nama Inrehab	No	Nama Inrehab
1	Wanapura	7	Wanasurya	13	Giripura
2	Wanareja	8	Wanakencana	14	Bantalareja
3	Wanayasa	9	Wanamulya	15	Indrapura
4	Savanajaya	10	Wanadharma	16	Indrakarya
5	Wanakarta	11	Wanaasri	17	Argabhakti
6	Wanawangi	12	Birawa Wanajaya	18	Adhipura

Sumber: Pramoedya Ananta Tour, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu: Catatan-catatan dari Pulau Buru (Kuala Lumpur: Wira Karya, 1995).

2. Perubahan Sosial Kehidupan Masyarakat Tahanan Politik di Desa Savana Jaya

Seperti yang sudah di jelaskan oleh Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 1990 : 126). Perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Berikut dijelaskan perubahan sosial kehidupan masyarakat tahanan politik berdasarkan pendapat Gillin dan Gillin tentang perubahan social antara lain:

a) Perubahan Kondisi Geografis Tahanan Politik

Pada awal kedatangan tapol 1970 Pulau Buru dulunya merupakan hutan belantara penuh dengan tumbuh-tumbuhan liar dan juga ilalang, rawa-rawa, padang rumput yang luas, hutan belantara dengan pohon rotan di sana sini. Pohon salak yang dikira bisa menjadi asupan makanan untuk beberapa hari ternyata hanya

ujung pohon rotan kering sehingga mereka harus bekerja keras untuk menyulapnya menjadi lahan yang bisa ditanami untuk bertahan hidup. Sagu sebagai tanaman yang diandalkan oleh penduduk lokal sebagai sumber makanan mereka. Penduduk Buru memiliki budaya seperti pertanian tari-tarian seperti sawat Buru dan cakalele, serta nyanyian-nyanyian Buru seperti inafuka yang lazim dilantunkan pada pelaksanaan ritual tersebut. Tradisi penduduk Waeapo dalam pembukaan lahan kebun baru. Mulanya, tapol itu dipenjara di Pulau Nusakambangan. Namun, kemudian dipindahkan sebab ribuan tapol tak dapat tertampung. Akhirnya, mereka dipindahkan ke Pulau Buru (wawancara dengan bapak H.W).

Tapol golongan B mendominasi Pulau Buru. Jumlahnya mencapai 12.000 orang. Mereka adalah yang dianggap terlibat, tetapi tak secara langsung. Istilahnya, hanya sebagai kader. Para tapol yang dimasukkan ke dalam golongan B merupakan hasil seleksi dari golongan A atau mereka yang terlibat langsung dan dihukum mati mati. Sementara itu, tapol golongan C berisi orang-orang yang dianggap sebagai kader PKI yang ikut-ikutan. Selama rentang 1968 hingga 1976, para tapol diseleksi lagi hingga banyak yang naik ke jenjang golongan B. namun, tak sedikit pula yang turun menjadi tapol golongan C.

Dahulu terdapat 21 unit barak untuk dihuni para tapol di Instalasi Rehabilitasi atau Inrehab nama resmi kamp penahanan Pulau Buru. Yakni unit I hingga XVIII, lalu ada unit R, S dan T dengan lokasi yang tersebar. Terdapat unit khusus untuk mengisolasi tahanan yang membangkang. Setiap unit diisi sekitar 500 tahanan. Secara keseluruhan terdapat 12.000 orang yang datang ke pulau Buru lalu menempati 21 unit-unit barak pengasingan. Barak ini berdinding bambu, bertiang kayu dan beratap daun rumbia. Tempat tidur para eks orang-orang buangan juga terbuat dari bambu. Barak ini ditempati 50-100 orang dengan ukuran yang cukup untuk menampung mereka (wawancara dengan bapak D.U).

Sebelum diasingkan ke Pulau Buru, para tahanan politik (tapol) yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia memiliki beragam latar belakang geografis. Beberapa di antaranya berasal dari daerah perkotaan seperti Jawa,

Jakarta, Surabaya, atau Medan, sementara yang lain berasal dari daerah pedesaan atau pulau-pulau terpencil di Indonesia. Mereka juga tinggal di lingkungan perkotaan atau pedesaan di berbagai wilayah di Indonesia, dengan akses yang lebih mudah ke fasilitas umum dan masyarakat luas.

Setelah diasingkan ke Pulau Buru, tahanan politik (tapol) menghadapi berbagai kondisi geografis yang berbeda tergantung dari mana mereka ditempatkan di pulau tersebut. Pulau Buru memiliki topografi yang beragam, termasuk pegunungan, hutan lebat, dan daerah dataran rendah. Kondisi geografis mereka berubah drastis. Pulau Buru terletak di timur Indonesia, jauh dari pusat kegiatan politik dan pusat populasi utama. Pulau ini memiliki iklim tropis dengan hutan hujan yang lebat dan kadang-kadang terisolasi dari dunia luar. Perubahan ini tidak hanya mencakup lingkungan fisik, tetapi juga mencakup akses terhadap sumber daya dan fasilitas. Tahanan politik menghadapi keterbatasan dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai. Mereka juga mungkin mengalami isolasi sosial karena terpisah dari keluarga dan teman-teman mereka.

Selain itu, perubahan kondisi geografis juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional tahanan politik. Kehidupan di lingkungan yang terpencil dan terisolasi seperti Savana Jaya dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi bagi tahanan politik yang diasingkan. Tapol yang diasingkan ditempatkan di kamp-kamp yang tersebar di seluruh Pulau Buru. Beberapa di antaranya ditempatkan di daerah pegunungan atau hutan yang lebat, sementara yang lain ditempatkan di daerah dataran rendah atau di sepanjang pantai. Kondisi geografis Pulau Buru pada umumnya cukup sulit. Hutan hujan tropis yang lebat, medan yang berbatu, dan curamnya jalur-jalur pedesaan dapat membuat akses menjadi sulit bagi tapol maupun petugas yang mengawasi mereka. Selain itu, cuaca di pulau tersebut dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi hidup tapol, dengan hujan yang sering terjadi di sebagian besar tahun. Namun, meskipun kondisi geografis Pulau Buru bisa sangat menantang, tapol juga memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitar mereka untuk bertahan

hidup, seperti memanen tanaman atau mencari sumber air.

Kondisi hidup tapol di Savana Jaya juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan perlakuan yang mereka terima dari pihak yang mengawasi mereka. Sebagai contoh, kondisi pemukiman mereka, akses terhadap pangan dan air bersih, serta kebebasan bergerak mereka bisa sangat bervariasi tergantung pada kebijakan dan praktik penjagaan yang diterapkan. Kehidupan sehari-hari tahanan politik di Savana Jaya dapat sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Mereka terlibat dalam kegiatan seperti pertanian subsisten atau pekerjaan lain yang tersedia di lingkungan pulau tersebut. Ini merupakan perubahan signifikan dalam pola hidup dan rutinitas mereka. Tahanan politik yang diasingkan ke Pulau Buru harus beradaptasi dengan kondisi geografis yang berbeda dan seringkali menantang. Setelah datang dipulau Buru tapol bekerja membersihkan lahan rumput. Mereka bekerja hanya dengan tangan, tanpa alat bantu. Nantinya, lahan itu diolah menjadi area persawahan dan perladangan. Mereka semua bekerja sama, hingga terbentuklah areal persawahan sebagai bekal hidup di sana. Para tapol juga bekerja membuka hutan dan membuka jalan. Gersangnya Pulau Buru lantas disulap menjadi daerah pertanian luar biasa oleh para tahanan politik masa orde baru, di antaranya para seniman bangsa yang diduga memiliki hubungan kedekatan dengan PKI pun ikut mengubah pulau ini menjadi daerah sumber budaya. Selama 10 tahun mereka bertahan hidup di sana menghasilkan sebuncha hasil bumi yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Tapol mengerahkan segenap tenaga untuk menciptakan lahan perkebunan baru sebagai sumber makanan mereka. Pada minggu-minggu awal, para tahanan sempat mulai menanam singkong dan ubi-ubian di sekitar Buru dan menggemburkan tanah-tanah yang tandus akibat jarang diolah. Namun, lantaran musim kemarau yang masih menyelimuti Buru pada waktu itu membuat semua tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur.

Lambat laun, ketika musim penghujan sudah mulai datang, tanah mulai gembur dan tanaman singkong mulai bertunas, para tapol menambahi tanaman pisang dan beberapa bibit buah-buahan yang dapat membantu asupan gizi

mereka selama hidup di sana. Sawah Buru yang awalnya penuh dengan rerimbunan pohon minyak kayu putih yang kerap mengering karena panas terik matahari dan juga ilalang yang tak terurus itu kini menjadi area persawahan hijau dengan luas lebih dari 1.700 hektar yang dijadikan para tahanan politik untuk bertahan hidup selama mereka dalam masa penahanan. Selain menghasilkan makanan dan lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan, beberapa tahanan politik yang notabene adalah seniman dan budayawan berinisiatif untuk membangun sebuah gedung kesenian yang bisa dijadikan wadah mereka untuk tetap berkarya dan produktif menghasilkan berbagai kesenian yang dapat mereka berikan untuk warga sekitar.

Beberapa peninggalan tahanan politik kini masih dimanfaatkan oleh warga sekitar, seperti gedung kesenian yang kini telah direnovasi dan tetap kokoh untuk dijadikan segala aktivitas kebudayaan, dan juga lahan pertanian yang semakin hijau banyak menghasilkan bahan makanan untuk warga sekitar. Kini Pulau Buru mengubah wajahnya, yang tadinya rawa dan penuh dengan hutan belantara kini bernuansa surga. Hasil perjuangan dan jejak langkah korban politik Orde Baru. Kesan seram yang melekat pada Pulau Buru perlahan sirna berganti harapan. Petak sawah peninggalan para korban tahanan politik menopang hidup warga Pulau Buru dan Provinsi Maluku secara umum. Buru yang kini menyembulkan harapan tak lepas dari tetesan darah dan keringat korban stigma politik. Kemudian pada pembebasan/pemulangan Tapol hingga tahun 1980 banyak tapol yang memutuskan untuk tinggal dan menjadi penghuni Savanajaya, hasil dari tanaman padi sudah jadi tumpuan hidup tapol mereka bisa makan, bisa beli perabot rumah, dan anak-anak bisa sekolah sampai lulus sekolah menengah atas, semuanya dari hasil padi.

b) Kebudayaan Material

Kebudayaan material mengacu pada objek fisik, artefak, dan benda-benda yang diciptakan dan digunakan oleh manusia yang mencerminkan budaya mereka. Objek-objek ini mencakup peralatan, bangunan, pakaian, kendaraan, senjata, dan benda lainnya yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat atau

disentuh. Kebudayaan material tidak hanya melibatkan keberadaan fisik dari objek-objek tersebut tetapi juga makna dan simbolisme yang terkandung di dalamnya serta bagaimana mereka digunakan dan dihargai oleh masyarakat (An-Nur. 2024).

Seperti yang dijelaskan oleh D.U bahwa tahanan politik (tapol) memiliki beragam latar belakang budaya tergantung pada asal daerah dan kelompok etnis mereka di Indonesia. Kebudayaan tapol mencakup berbagai hal, seperti bahasa, tradisi, adat istiadat, dan agama. Di Indonesia, dengan beragam suku dan budaya yang ada, tapol bisa berasal dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Mereka memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda, termasuk bahasa ibu, makanan khas, pakaian tradisional, dan ritual keagamaan. Sebagai contoh, tapol dari suku Jawa memiliki tradisi dan budaya Jawa yang khas, sementara tapol dari suku Sunda memiliki kebiasaan dan tradisi Sunda yang berbeda. Begitu juga dengan tapol dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Sebagai contoh, tapol dari suku Jawa memiliki tradisi dan budaya Jawa yang khas seperti ketika mereka berada di lingkungan yang jauh dari tanah asal, para tapol tetap menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari. Ini membantu mereka menjaga identitas dan solidaritas di antara sesama tapol, kepercayaan-kepercayaan tradisional dan adat istiadat seperti slametan (ritual selamat), nyadran (ziarah kubur), dan berbagai ritual lain tetap dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya dan kepercayaan mereka, sementara tapol dari suku Sunda memiliki kebiasaan dan tradisi Sunda yang berbeda contohnya para tapol Sunda melaksanakan upacara-upacara seperti seren taun (upacara syukuran panen), muludan (peringatan Maulid Nabi), dan berbagai ritual selamat. Upacara-upacara ini dilakukan untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya mereka. Begitu juga dengan tapol dari daerah-daerah lain di Indonesia. Interaksi yang terjadi antara tapol Jawa dan tapol Sunda ketika berada di satu kamp atau tempat yang sama yaitu menggunakan Bahasa Indonesia.

Penduduk pribumi di Pulau Buru sebelum kedatangan tahanan politik terdiri dari berbagai kelompok etnis dan sosial yang tinggal di sana sebelumnya. Mereka terdiri dari suku-suku

pribumi seperti suku Manusela, suku Kayeli, atau suku lainnya yang tinggal di Pulau Buru. Mereka juga memiliki struktur sosial yang didasarkan pada adat dan tradisi lokal, dengan kepala desa atau pemimpin lokal yang memimpin komunitas mereka.

Dalam wawancara nya F.M menjelaskan bahwa belian menikah dengan tapol pada tahun 1979, masyarakat yang kala itu mendengar bahwa adanya pernikahan antara penduduk pribumi dengan tapol merasa senang karena bisa masyarakat adat bisa melihat langsung pernikahan adat Buru dengan tapol, karena dalam proses pernikahan tersebut masyarakat pribumi menggunakan pakaian adat Buru sedangkan tapol laki-laki menggunakan topi blangkon Jawa. Dengan adanya pernikahan tersebut maka tali silaturahmi antara tapol dengan penduduk pribumi semakin kuat dan mereka bisa lebih saling berinteraksi dan saling membantu satu sama lain. Dengan adanya percampuran pernikahan adat Buru dengan Jawa maka hingga sekarang banyak masyarakat yang menikah menggunakan adat Jawa dan ada juga yang menikah menggunakan dua adat tersebut.

Tak semua penduduk membenci kehadiran tapol. Adaptasi dua kelompok masyarakat itu lama-kelamaan terjalin. D.U, misalnya, diajarkan penduduk memilih pohon sagu layak produksi. "Kalau diketok terdengar nyaring, berarti isinya air. Tapi kalau padat, isinya banyak" kata D.U. Bahkan dia disuruh bersembunyi jika ada tentara beroperasi. Sejak menghirup udara bebas yang dicengkeram bertahun-tahun di Tefa Buru, banyak tahanan bujang menemukan jodoh di sini. Beberapa di antara mereka menikah dengan anak-anak eks tapol, yang sebelumnya rekan sebarak semasa ditawan. Usia mereka terkadang terpaut 20 tahun.

Menurut H.W sebagian penduduk pribumi merasa takut atau tidak percaya terhadap kedatangan tahanan politik. Hal ini disebabkan oleh propaganda pemerintah yang menjelek-jelekkan tahanan politik, atau oleh ketakutan akan reaksi pemerintah terhadap siapa pun yang terlihat mendukung atau berinteraksi dengan tahanan politik. Beberapa penduduk pribumi memilih untuk tetap netral atau bersikap bijaksana terhadap kedatangan

tahanan politik. Mereka tidak terlibat secara langsung dengan tahanan politik, tetapi juga tidak mendukung upaya pemerintah untuk menekan atau mengisolasi.

Tali persaudaraan antara penduduk asli Pulau Buru dengan para tahanan politik (tapol) yang dibuang pada tahun 1970 masih terjalin kuat. Walau pada awal masa, hukuman fisik siap-siap menanti para tapol bila ketahuan bertemu dengan penduduk asli Pulau Buru. Sejak mereka dituding terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI), tentara selalu memantau gerakan para tapol. Kepada penduduk asli, tentara pun mengingatkan agar tidak menemui para tahanan. Tidak mudah menemui penduduk asli Pulau Buru saat itu, apalagi mereka masih hidup nomaden. Hal yang bisa dilakukan oleh para tapol hanya menunggu di hutan. Awalnya yang mereka lakukan hanya melihat seperti apa aktivitas penduduk asli. Tetapi lambat laun, timbul keinginan untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Kata dagosa sebagai ucapan pertama kali yang dilontarkan warga asli Buru. Kosakata dagosa memiliki arti baik, orang asli Buru bermaksud mengatakan bahwa pemberian barang-barang seperti beras dan tembakau dari tapol buru menunjukkan bahwa mereka bukan orang jahat. Pertemuan itu menjadi awal dari banyak pertemuan selanjutnya. Intensnya pertemuan itu membuat bahasa yang berbeda tidak lagi jadi kendala. Penduduk asli Pulau Buru mempelajari bahasa Indonesia, begitu pula tapol belajar bahasa Pulau Buru (Risky Kusumo. 2023).

Interaksi sosial yang terjalin membuat penduduk asli Buru merasa bahwa para tapol adalah saudara mereka. Sebutan bapak angkat dan anak angkat menjadi hal yang biasa saat itu sebagai simbol persaudaraan yang terjalin. Bahkan tidak sedikit tapol yang kemudian menikah dengan penduduk asli Pulau Buru. Walau banyak juga tapol Buru yang memilih kembali ke Pulau Jawa. Sekitar 10.000 tahanan saat dibebaskan sejak tahun 1977 sampai 1979. Penduduk asli Pulau Buru sangat kehilangan mereka (Risky Kusumo. 2023).

Stigma terhadap para eks tapol itulah yang menyebabkan D.U terpaksa memilih untuk menetap di Pulau Buru, yang pernah menjadi 'penjaranya'. D.U ditangkap pada 11 November 1968, dan di penjara di beberapa tempat sebelum

di pindahnya ke Nusa Kambangan lalu tiba di Buru pada 10 September 1971 dan di tempatkan di unit XVIII. "Istri saya meninggal karena stres setelah saya ditahan, begitu juga anak dalam kandungannya". Ungkapnya. "Saya berpikir kalau saya yang ga bisa merawat anak saya seperti yang saya harapkan saya akan menderita lagi, maka saya memutuskan untuk tinggal disini," jelas D.U. Dia menikah dengan perempuan asli Pulau Buru dan memiliki empat anak. Anaknya sulungnya dibesarkan oleh orangtua di Jawa Tengah. D.U menghidupi keluarganya dari warung di rumahnya dan beternak sapi. "Yang saya pikirkan sekarang hanya bagaimana anak-anak bisa sekolah supaya pintar, agar tidak dibodohi kayak saya ini, tidak salah dianggap bersalah sampai dibuang ke sini," ungkap D.U.

Dalam wawancaranya H.W memilih tidak kembali ke daerah asalnya di Solo karena sudah tidak lagi mengetahui keberadaan keluarga dan sanak saudaranya di sana. Meski demikian H.W mengaku tidak sampai merasakan kesedihan mendalam selama menjalani masa pengasingan di Pulau Buru. "Dulu kalau ada yang menangis pasti diketawai oleh kawan yang lain. Makanya kami selalu gembira dan senang menjalani hidup semasa itu," kata H.W.

D.U menjelaskan bahwa pernah dituding membuat simbol mirip palu-arit di salah satu bangunan yang dibuatnya. "Dulu saya bikin di bangunan di sekolah, saya pake joglo gitu ada lengkungan kayak rumah Jawa, lalu ada seorang Babinsa yang mengatakan saya membuat logo palu arit, itu pasti orang ga pernah keluar dari sini atau berkunjung ke Pulau Jawa," ungkap D.U kesal. Dia mengaku saat itu tak bisa tidur semalaman karena memikirkan tuduhan tersebut. Dia berharap tak ada lagi kecurigaan terhadap para eks tahanan politik. Lebih-lebih, justru mereka lah yang membangun pertanian, irigasi, dan jalanan di Pulau Buru, yang semula hutan belantara.

Dalam wawancaranya P.M menjelaskan bahwa kehidupannya sebagai anak dari mantan tahanan politik merasa terisolasi ketika datang ke Buru karena masyarakat pribumi memandang mereka sebelah mana, yang dimana penduduk pribumi merasa bahwa keturunan dari tapol jahat terhadap masyarakat sekitar namun sebenarnya itu hanya kebohongan dari

orde baru yang di bawah kekuasaan Soeharto. Akibat dari permainan politik orde baru menyebabkan sebagian besar anak-anak dari eks tapol tidak bisa meraih mimpinya menjadi abdi Negara. Namun kini di akibatkan kebanyakan usia anak-anak eks tapol sudah tidak muda lagi maka mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai petani dan ada juga beberapa yang menjadi PNS. Dalam interaksi ketika pertama kali datang ke Buru bahwa penduduk pribumi tidak menerima kehadiran tapol karena masyarakat adat khususnya, mereka sudah mendapat informasi negatif dari TNI bahwa tapol jahat namun lambat laun ketika penduduk pribumi mengetahui bahwa tapol tidak memiliki niat jahat maka penduduk pribumi merasa tertarik dengan bimbingan tapol terhadap anak-anaknya maka penduduk pribumi sudah tidak lagi menganggap tapol sebagai orang jahat. Hingga kini banyak anak-anak dari eks tapol yang menetap di Buru dan menikah dengan masyarakat transmigran dari Jawa dan ada juga yang menikah dengan penduduk asli Buru.

c) Komposisi Penduduk

INREHAB (Instalasi Rehabilitasi) Pulau Buru meliputi dua puluh dua unit pemukiman tapol, yang berada di bawah Badan Pengelola Resettlement Pulau Buru yang berada di Jakarta. Jumlah tapol menurut perhitungan Hersri (salah satu tapol dan juga penulis buku) berjumlah kurang lebih 12.000 orang (11.948 tapol) (Setiawan, H. 2004 : 223 & 526). Dalam wawancaranya D.U juga menjelaskan bahwa tapol yang datang ke Pulau Buru pada tahun 1969 berjumlah 12.000 orang dengan 1 kapal berisi 500 orang kemudian ditempatkan ke 21 unit yang berada di Pulau Buru.

Sebelum datangnya transmigran, sudah datang keluarga tapol di Tefaat pada 1972. Mereka ditempatkan di Savanajaya. Pemerintah mengirim 652 keluarga tapol, yakni 164 istri, 485 anak, dan 3 ibu. Lima tahun berikutnya dikirim 109 keluarga tapol dari Jawa mendiami tujuh unit. Kini luas Savanajaya 26 kilometer persegi. Terletak 15 kilometer dari Namlea, ibu kota Kabupaten Buru dan berjarak 20 km dari pusat kecamatan. Oktober 1980 tercatat 209 tapol yang menetap di Buru. Mereka yang disusul sanak saudara dipindahkan dari barak ke rumah berukuran 6 x 6 meter persegi. Pada 1976

pembangunan rumah keluarga tapol mencapai 240 buah (Aulia I.V. & Ihsan Reliubun. 2021).

Berdasarkan pengelolanya, maka Buru menjadi Pulau tertutup. Pada tahun 1972, desa Savanajaya kemudian dijadikan desa tapol berkeluarga yang mencapai lebih 200 kepala keluarga. Berdasarkan surat keputusan Komkamtib tanggal 15 November 1978, No skep 60/Kopkam/XI/1978 tapol berkeluarga dari desa Savanajaya dinyatakan dibebaskan dari status tapol. Pada tanggal 14 Oktober 1979, sekitar 160 KK penghuni desa itu, pulang ke Jawa. Akan tetapi ada juga yang tidak ingin pulang dengan beberapa alasan (Setiawan, H. 2004 : 224-231).

d) Ideologi

Pasca pemilu 2019, mantan tahanan politik berharap siapapun presiden yang terpilih nanti dapat mengembalikan nama baik mereka dan keluarganya agar mereka dapat hidup lebih aman dan tentram. Harapan tak terjadi lagi peristiwa yang pernah mereka rasakan pun terus terucap. H.W menjelaskan bahwa kini hidup tenang di Savana Jaya bersama istrinya dan keluarga besarnya. Dia punya tiga anak dari pernikahan pertama, dua anak dari pernikahannya dengan istri kedua, dan lima anak angkat. Dari anak-anak maupun anak angkatnya, ia kini punya 18 cucu. "Kalau semua cucu berkumpul rumah ini menjadi sangat ramai", katanya. Setiap harinya bekerja untuk menggarap ladang seluas setengah hektare yang ditanami aneka buah, sayur dan palawija, serta kebun tanaman obat dan tanaman hias di halaman rumah. Namun sekarang dikarenakan usia yang sudah mulai menua maka H.W menghabiskan waktunya dengan membantu sang istri di rumah saja dengan membuka pondok. Sebagaimana warga Savana Jaya lainnya, H.W juga merasakan kemeriahan menjelang pesta demokrasi dan bersiap-siap menggunakan hak pilih. Dia berharap kemeriahan pemilihan umum tidak dinodai dengan aksi saling menjelekkkan antar-kontestan, juga penyebaran informasi dan berita bohong serta ujaran kebencian. "Syukurlah warga di Savana Jaya tidak terpengaruh dengan berbagai tayangan berita yang berisi ujaran kebencian, hoax atau saling menjelekkkan antar sesama pendukung", ujarnya. Ia mengatakan warga

Desa Savana Jaya umumnya hanya menganggap tayangan negatif seperti angin lalu. "Di sini tidak ada yang saling menjelekan atau menyebar berita bohong. Hidup rukun, aman dan damai sangat dijunjung tinggi warga Savana Jaya," katanya.

Saat berbincang mengenai Pemilu, ketika warga akan memilih presiden/wakil presiden, serta anggota DPD, DPR, DPRD I dan DPRD II dalam satu waktu, H.W juga mengungkapkan karakter pemimpin idamannya. "Bangsa ini butuh pemimpin masa depan yang merakyat. Artinya mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas segala-galanya", katanya. Pemimpin bangsa lima tahun mendatang, menurut H.W, haruslah Pancasilais, mampu menjalankan butir-butir penghayatan dan pengamalan dasar negara. "Pemimpin Indonesia ke depan harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya. Keadilan sosial yang dia maksud adalah pemerataan pembangunan di berbagai sektor yang manfaatnya menjangkau warga seluruh pelosok Tanah Air hingga lapisan masyarakat paling bawah. "Jangan sampai yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin malah tambah miskin", demikian H.W

Para tapol yang beragama Islam mendirikan masjid dan musholla di berbagai lokasi di Pulau Buru. Salah satu masjid yang terkenal adalah Masjid Al-Anshor yang didirikan di Unit V Waeapo. Masjid ini dibangun sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan keagamaan bagi para tahanan politik. Shalat lima waktu dan shalat Jumat dilakukan secara berjamaah. Para tapol sering berkumpul di masjid atau musholla untuk melaksanakan shalat berjamaah sebagai bentuk solidaritas dan penguatan spiritual di tengah kondisi yang sulit. Pengajian dan pembelajaran agama dilakukan secara rutin. Para tapol mengadakan sesi pengajian di mana mereka membaca dan mempelajari Al-Quran serta mendiskusikan berbagai aspek keagamaan. Kegiatan ini tidak hanya untuk memperdalam pengetahuan agama, tetapi juga untuk memperkuat mental dan spiritual mereka. Para tapol merayakan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun dalam kondisi yang terbatas, mereka tetap berusaha menjalankan tradisi

keagamaan ini dengan berkumpul, salat bersama, dan berbagi makanan.

Beberapa tapol yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang agama mengadakan majelis taklim. Mereka mengajarkan tafsir Al-Quran, fiqh, dan akhlak kepada sesama tahanan. Kegiatan ini membantu menjaga semangat dan moral para tapol di tengah tekanan dan penderitaan. Zikir dan doa bersama sering dilakukan untuk memohon kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah shalat berjamaah atau pada waktu-waktu tertentu seperti setelah subuh atau sebelum maghrib. Beberapa kelompok keagamaan dibentuk di dalam kamp tahanan untuk mengorganisir kegiatan keagamaan secara lebih terstruktur. Kelompok-kelompok ini sering mengadakan pertemuan rutin untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan ibadah.

Kini akhir dari tahun 1980 para eks Tapol telah menjadi bagian dari masyarakat. Keberadaan mereka diakui secara sosial. Mereka tidak berbeda dengan warga negara lainnya, kecuali terkait dengan identitasnya sebagai eks Tapol. Di sisi lain, pandangan bahwa PKI adalah ateis, kejam, atau pun pengkhianat Negara menjadi bagian dari masyarakat. Pandangan tersebut muncul sebagai konsekuensi atas tuduhan Orde Baru terhadap PKI terkait dengan peristiwa G30S Orde Baru melakukan konstruksi sedemikian rupa sehingga masyarakat mempunyai pandangan negative tentang G30S dan PKI. Hal ini tentunya menjadi stigma bagi eks Tapol. Meskipun mereka telah menjalani penahanan dan berperilaku sebagaimana layaknya, masyarakat masih melihat dari sudut pandang yang negatif. Sehingga tidak jarang muncul diskriminasi terhadap eks Tapol. Keberadaan stigma dan diskriminasi selanjutnya dapat mempengaruhi konsep diri dari eks Tapol (Hidayat, R. : 2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang perubahan sosial kehidupan masyarakat tahanan politik di Desa Savana Jaya, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, dapat disimpulkan bahwa Pulau Buru, yang dulunya merupakan

hutan belantara, telah diubah oleh para tahanan politik menjadi daerah pertanian yang produktif. Para tahanan bekerja membersihkan lahan, membuka hutan, dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi. Mereka berhasil mengubah pulau yang gersang menjadi sumber pertanian yang subur, dengan hasil bumi yang bermanfaat bagi warga sekitar.

Perubahan sosial yang signifikan juga terjadi dalam aspek ekonomi, bahasa, dan budaya. Secara ekonomi, para tahanan politik mengajarkan penduduk pribumi cara mengolah tanah menjadi sawah dan ladang, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dari segi bahasa, interaksi antara tahanan politik yang berasal dari berbagai daerah dengan penduduk pribumi memicu pertukaran bahasa dan meningkatkan hubungan kekerabatan. Budaya juga mengalami perubahan, dengan adanya pernikahan antara tahanan politik dan penduduk pribumi, yang menciptakan perpaduan budaya Jawa dan Buru.

Meskipun dihadapkan pada kondisi yang sulit, para tahanan politik mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui adaptasi, inovasi, dan kerja keras. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif tentang perubahan sosial di Pulau Buru, tetapi juga memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika perubahan sosial di tengah masyarakat yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- An Nur. (2024). *Kebudayaan Material dan Non Material: Pengertian, Contoh, Perbedaan, Persamaan, dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Diakses dari <https://an-nur.ac.id/blog/mengenal-kebudayaan-materi-dan-non-materil-pengertian-contoh-perbedaan-persamaan-dan-dampaknya-bagi-masyarakat.html> pada 28 Mei 2024.
- Aulia I.V. & Ihsan Reliubun. (2021). *Kisah Eks Tapol 65 yang Bertahan dan Tak Pulang dari Pulau Buru*. Diakses dari <https://lpmarena.com/2021/09/30/kisah-eks-tapol-65-yang-bertahan-dan-tak-pulang-dari-pulau-buru/> pada 11 Juni 2024.
- Baskara T. Wardaya. (2014). *Luka Bangsa Luka Kita*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Batkunde Arnold. (2001). *Paradigma Kualitatif Dalam Merancang Proposal Menuju Skripsi Sebuah Kajian Teoritis dan Praktis*. FKIP-UNCEN: Jayapura.
- Budi, W. (2020). *Proses Terbentuknya Ruang oleh Tahanan Politik Pulau Buru, Provinsi Maluku*. Disertasi doktoral, PWK.
- Dewi, A. I., & Herawati, A. F. (2021). *Akulturas Budaya Sosial Dan Makna Simbolik Tari Dero*. Kinesik, 8(3), 234-241.
- Goa, L. (2017). *Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat*. SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral, 2(2), 53-67.
- Harahap, N. (2014). *Penelitian Kepustakaan*. Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi, 8(1), 68-74.
- Haryati, T. (2018). *Tahanan Politik Pulau Buru Maluku (1969-1979)*. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, 3(2), 685-690.
- Herdysta, Onie. (2014). *Makna Hidup Mantan Tahanan Politik Pulau Buru Di Usia Lanjut*. Disertasi doktoral, Universitas Brawijaya.
- Hidayat, R. (2005). *Konsep-Diri Eks Tahanan Politik: Studi Tentang konsep-diri Eks Tahanan politik peristiwa G30 S berkaitan dengan adanya Stigma dan Diskriminasi di Kota Surabaya*. Disertasi doktoral, Universitas Airlangga.
- Husain, S. B. (2019). *Menjemput Kerinduan Keluarga: Penyelesaian Dan Pengembalian Tahanan Politik Pulau Buru Ke Masyarakat, 1965-1979*. Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya, 14(2).
- Jati, P. (2016). *Fungsi filsafat, agama, ideologi dan hukum dalam perkembangan politik di Indonesia*. Yuridika, 31(1).
- KontraS, G. T. (2012). *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*.
- Krisnadi, I. G. (1997). *Sejarah Tahanan Politik Di Pulau Buru (1969-1979)*.
- Lestariningsih, A. D. (2011). *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Martha, Y., Sa'diyah, D., Maulana, H., & Warto, W. (2023). *Konsep Dasar Sejarah: Implementasinya Dalam Pembelajaran*.

- Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, 1(4), 164-176.
- Mantra. I. B. (2000). Demografi Umum. Pustaka Pelajar.
- Naomi S.M Lesbatta, Widhi Handayani & Pamerdi Giri Wiloso. (2021). Yang Terbuang, Yang Membangun: Studi Perubahan Sosial Di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Oleh Eks Orang-Orang Buangan 1969-1979. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 45-53.
- Nugroho, A. P. (2022). Subjek Politik dalam Cerpen "Ode untuk Selemba KTP" Karya Martin Aleida. *Jurnal Nusantara Raya*, 1(1), 28-43.
- Pramoedya Ananta Toer. (1988). *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*. Lentera.
- Risky Kusumo. (2023). Ikatan Persaudaraan Tapol dengan Warga Asli Pulau Buru di BaliUjung Bedil. Diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/07/ikatan-persaudaran-tapol-dengan-warga-asli-pulau-buru-di-balik-ujung-bedil> pada 11 Juni 2024.
- Setiawan, A. E. (2016). Dinamika Kehidupan Tahanan Politik Pulau Buru (1965-1970). *Risalah*, 2(8).
- Setiawan, H. (2004). *Memoar Pulau Buru*. IndonesiaTera.
- Sumigo, L. (2016). Potret Kekerasan Terhadap Tapol Pulau Buru Dalam Novel *Amba* Karya Laksmi Pamuntjak: Tinjauan Poskolonial. Disertasi doktoral, Universitas Brawijaya.
- Syahrul, S. (2015). Dakwah Natio-education Pada Masyarakat Eks Tahanan Politik Di Kampung Nanga-nanga Kota Kendari Sulawesi Tenggara. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah*, 16(2), 305-319.
- Tusipa, N. R. (2023). Kehidupan Sosial Tahanan Politik Pulau Buru Tahun 1969-1979. Disertasi doktoral, Universitas Siliwangi.
- Watimena, B. (2020). Proses Pembentukan Ruang Oleh Tahanan Politik Pada Masa Pembuangan Di Pulau Buru Provinsi Maluku (Periodisasi Tahun 1969-1979). Disertasi doktoral, ITN MALANG.
- Wikipedia Enssiklopedia Bebas. (2024, Januari 31). Tahanan Politik. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tahanan_Politik.